

ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH PROVINSI RIAU PERIODE 2019-2023

Febri Dheanti¹, Gusrianti²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: febridheanti@gmail.com¹, gusrianti@uinbukittinggi.ac.id²

ABSTRAK

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja untuk tahun 2019 hingga 2023 dilakukan dengan pendekatan *value for money*, yang meliputi analisis terhadap dinamika pendapatan dan belanja serta penilaian rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Jenis penelitian yang digunakan ialah kuantitatif-deskriptif, dengan sumber data berupa laporan realisasi anggaran Pemerintah Provinsi Riau selama lima tahun terakhir. Hasil studi memperlihatkan bahwa kinerja fiskal dalam aspek pendapatan cenderung mengecewakan karena realisasi yang sering kali berada di bawah target, kecuali pada tahun 2021 yang menunjukkan pencapaian optimal. Di sisi lain, pengeluaran menunjukkan pola yang lebih baik karena anggaran yang digunakan selalu berada di bawah alokasi. Rasio ekonomi mengindikasikan bahwa pelaksanaan anggaran belum efisien secara menyeluruh, mengingat persentase realisasi yang melebihi ambang batas ideal. Efisiensi juga tergolong rendah, terutama pada 2022 dan 2023, ketika belanja melebihi penerimaan. Namun efektivitas pengelolaan tetap tinggi setiap tahun, dengan capaian terbaik terjadi pada 2021. Secara keseluruhan, meskipun terdapat indikator efektivitas yang baik, diperlukan evaluasi menyeluruh agar pengelolaan anggaran Provinsi Riau menjadi lebih hemat dan efisien, tanpa mengorbankan hasil program. Hasil penelitian ini menyoroti urgensi peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola keuangan publik.

Kata Kunci: Laporan Realisasi Anggaran, Kinerja Keuangan, Varians Pendapatan, Varians Belanja, Value for Money, Pemerintah Provinsi Riau.

ABSTRACT

The management of the Revenue and Expenditure Budget for the years 2019 to 2023 was carried out using a value-for-money approach, which includes an analysis of revenue and expenditure dynamics as well as an assessment of economic ratios, efficiency, and effectiveness. The type of research used was quantitative-descriptive, with data sources consisting of the Riau Provincial Government's budget realization reports for the past five years. The study results show that fiscal performance in terms of revenue tends to be disappointing, as realization often falls below targets, except in 2021, which achieved optimal results. On the other hand, expenditures show a better pattern, as the budget used is always below the allocation. Economic ratios indicate that budget implementation has not been fully efficient, given that the realization percentage exceeds the ideal threshold. Efficiency is also relatively low, particularly in 2022

and 2023, when expenditures exceeded revenues. However, management effectiveness remains high every year, with the best achievement occurring in 2021. Overall, despite the presence of good effectiveness indicators, a comprehensive evaluation is needed to make the budget management of Riau Province more cost-effective and efficient without compromising program outcomes. This research highlights the urgency of improving accountability and transparency in public financial management.

Keywords: Budget Realization Report, Financial Performance, Revenue Variance, Expenditure Variance, Value for Money, Riau Provincial Government.

A. PENDAHULUAN

Implementasi sistem otonomi daerah telah mendorong terbentuknya entitas-entitas pemerintahan lokal yang memiliki tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan publik dan pelestarian ketertiban regional. Transformasi sistem pemerintahan Indonesia dimulai sejak tahun 2001, ditandai dengan pengesahan Undang-Undang Otonomi Daerah. Awal mula regulasi mengenai otonomi daerah tercermin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian dimodifikasi melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Adapun pengaturan tentang desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, lalu diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Sebagai bagian dari agenda reformasi tata kelola keuangan negara, pemerintah sedang mengimplementasikan berbagai langkah untuk menjamin keterbukaan informasi serta memperkuat pertanggungjawaban publik. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi salah satu strategi utama yang digunakan sebagai kerangka normatif dalam menyusun dan mengomunikasikan laporan keuangan di seluruh tingkatan pemerintahan. Kinerja optimal pemerintah daerah sangat bergantung pada keberadaan sumber daya fiskal yang memadai dan sistem pengelolaan yang mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas.

Salah satu instrumen fundamental dalam tata kelola fiskal daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD disusun sebagai dokumen rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang memperoleh pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dokumen ini merepresentasikan arah kebijakan fiskal, alokasi sumber daya, serta rencana operasional pemerintah dalam satu periode anggaran. Fungsi APBD tidak semata-mata terbatas pada perencanaan, melainkan juga berperan sebagai sarana pengawasan dan penilaian atas kinerja keuangan pemerintah daerah. Tingkat kemampuan fiskal suatu pemerintah daerah dapat dicerminkan melalui besaran anggaran yang dimiliki, karena hal

tersebut mengindikasikan kapasitas pendanaan terhadap pelaksanaan pembangunan serta upaya pemerataan dan keadilan dengan mengoptimalkan potensi lokal. Salah satu indikator keberhasilan penerapan otonomi daerah ialah kemandirian fiskal. Dengan kemampuan finansial yang mencukupi, suatu daerah dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan secara mandiri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Pemerintah daerah bertanggung jawab menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai bagian dari pelaksanaan APBD. Laporan ini merangkum perolehan pendapatan dan pelaksanaan pengeluaran dalam satu periode fiskal, serta menggambarkan sejauh mana anggaran yang dirancang telah dilaksanakan. Namun, hanya mengandalkan LRA tidak cukup untuk mengevaluasi kualitas pengelolaan keuangan secara komprehensif.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kinerja fiskal pemerintah, diperlukan kajian yang mendalam atas Laporan Pelaksanaan Anggaran. Melalui proses ini, dapat diidentifikasi berbagai deviasi anggaran, dilakukan evaluasi terhadap efisiensi penggunaan dana, serta dinilai sejauh mana efektivitas pencapaian tujuan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Beberapa pendekatan analitis yang relevan mencakup analisis fluktuasi pendapatan dan belanja, serta penghitungan rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Beragam indikator tersebut menyajikan perspektif menyeluruh mengenai kapasitas finansial dan tata kelola administratif yang dimiliki oleh pemerintah.

Berbagai program pemerintah di Indonesia masih belum terlaksana sesuai dengan harapan yang diinginkan masyarakat. Salah satu indikatornya adalah lambatnya penyerapan anggaran belanja, yang umumnya baru terealisasi secara penuh di penghujung tahun fiskal. Data terbaru dari Pusat Analisis Parlemen DPR RI mencatat bahwa hingga November 2023, serapan anggaran belanja publik daerah hanya mencapai 64%, sedangkan pemerintah pusat telah membelanjakan sekitar Rp1.662,38 triliun atau setara 74% dari total anggaran.

Tabel 1. 1

Data Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Riau TA 2019-2023

Tahun	Pendapatan		
	Anggaran	Realisasi	%
2019	9.426.063.395.934,65	8.703.232.610.159,97	92,33
2020	8.736.933.522.998,05	8.622.824.848.906,57	98,69
2021	9.183.690.915.424,00	9.383.001.507.905,44	102,17

2022	8.948.201.160.414,00	8.818.669.764.115,17	98,55
2023	10.235.036.780.199,00	10.009.979.591.478,20	97,80

Sumber: Data LRA Pemerintah Provinsi Riau, 2024

Analisis terhadap pelaksanaan APBD Provinsi Riau dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa kinerja anggaran masih belum optimal. Walaupun target berhasil dicapai pada tahun 2021, penurunan signifikan pada 2022 mencerminkan ketidakstabilan dalam pengelolaan fiskal. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan anggaran dapat dikategorikan baik, perlu dilakukan pengkajian melalui analisis variasi pendapatan dan pengeluaran, serta penilaian menggunakan rasio ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Perbedaan utama antara studi ini dan penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan evaluatif yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan, serta pada fokus subjek dan objek yang lebih terarah. Penelitian ini memanfaatkan analisis kinerja terhadap pendapatan dan belanja daerah, melalui penerapan analisis varian serta perhitungan tiga rasio utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian ini secara khusus menelaah Laporan Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Provinsi Riau dalam rentang waktu 2019 hingga 2023.

B. KAJIAN PUSTAKA

Kinerja Keuangan

Untuk menilai apakah perusahaan telah mematuhi standar dan prosedur keuangan yang berlaku, dilakukan analisis terhadap kinerja keuangannya. Evaluasi ini melibatkan penyusunan laporan keuangan yang selaras dengan prinsip yang ditetapkan oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK), Prinsip Akuntansi yang Diterima Umum (GAAP), atau acuan lainnya. Kinerja keuangan menjadi indikator esensial dalam mengukur sejauh mana perusahaan mampu mengelola sumber daya serta menghasilkan keuntungan. IAI mendefinisikan kinerja keuangan sebagai kemampuan suatu entitas usaha dalam mengelola dan mengawasi sumber daya yang dimiliki, yang tercermin dari efektivitas dan efisiensi berdasarkan laporan keuangan.

Anggaran

Secara umum, anggaran dapat diartikan sebagai suatu rencana terstruktur yang meliputi seluruh kegiatan organisasi dan dituangkan dalam bentuk nominal keuangan untuk jangka waktu tertentu. Jika didefinisikan secara terbatas, anggaran hanya mencakup estimasi pendapatan dan belanja dalam satu tahun. Proses penyusunannya, atau budgeting, mencerminkan upaya untuk mendistribusikan dana yang terbatas guna mendanai kebutuhan

operasional yang bersifat luas dan tidak terbatas. Lebih dari sekadar alat perencanaan, anggaran juga berperan sebagai sarana pengawasan yang memungkinkan organisasi untuk menilai sejauh mana fungsi manajerial dijalankan sesuai dengan arahan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan pelaksanaan anggaran berfungsi sebagai instrumen yang menggambarkan bagaimana pelaksanaan keuangan suatu entitas berlangsung, mencakup pendapatan, belanja, transfer, posisi surplus/defisit, serta pembiayaan, yang kemudian dibandingkan dengan proyeksi anggaran yang telah ditentukan. Sebagai salah satu unsur utama dalam laporan keuangan pemerintah, IEP menyampaikan informasi perbandingan antara realisasi dan anggaran secara sistematis dalam rentang waktu tertentu. Penjelasan tambahan biasanya disertakan dalam catatan atas laporan keuangan. Di samping itu, IEP juga menjadi sarana untuk mengevaluasi apakah pemanfaatan sumber daya telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif, sejalan dengan ketentuan anggaran serta peraturan yang berlaku.

Laporan Realisasi Anggaran Menurut Perspektif Syariah

Perencanaan dalam perspektif Islam memandang anggaran sebagai suatu mekanisme pengambilan keputusan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu melalui tata kelola keuangan yang tepat. Kegiatan ini mencakup tahapan seperti perumusan rencana, penyusunan anggaran, evaluasi berkala, pengelolaan aset, serta pengawasan dana yang dijalankan sesuai dengan ketentuan syariah berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Fokus utama dari anggaran adalah memberikan nilai kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat, baik dalam bentuk pemenuhan kebutuhan maupun pelestarian kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan menjadi keharusan agar informasi yang disajikan dapat diandalkan. Selain itu, pengelolaan keuangan wajib menghindari unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti riba dan praktik spekulatif.

Kerangka Konseptual penelitian**Gambar 1. 2**

Kerangka Konseptual pemikiran

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif untuk mengungkap dan menyajikan kondisi serta variabel yang berkembang dalam masyarakat berdasarkan fakta yang ditemukan. Lokasi pelaksanaan penelitian berada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau, tepatnya di Jalan Cut Nyak Dhien, Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28156. Kegiatan penelitian dilakukan selama satu bulan, yaitu sejak 24 Juni hingga 24 Juli 2025. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang diperoleh melalui pengumpulan informasi dari berbagai laporan dan dokumen, baik yang telah dipublikasikan maupun yang masih bersifat internal, termasuk dokumen laporan keuangan yang disusun oleh pihak eksternal.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari Laporan Pelaksanaan Anggaran Pemerintah Provinsi Riau selama tahun 2019 hingga 2023. Dokumen yang menjadi sumber data terdiri dari laporan keuangan, catatan realisasi anggaran, serta dokumen pelaksanaan APBD. Populasi dalam studi ini meliputi seluruh data anggaran Pemerintah Provinsi Riau selama periode tersebut. Sampel dipilih secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan kesesuaian dari dokumen dan laporan keuangan yang relevan dalam rentang waktu 2019–2023. Pengumpulan data dilakukan melalui dua metode, yakni dokumentasi—yang mencakup penelaahan mendalam terhadap laporan pelaksanaan anggaran—dan wawancara yang bertujuan untuk memperoleh informasi tambahan dari pihak terkait.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Riau**

Tabel 1.2

Data Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Provinsi Riau

Tahun	Pendapatan		
	Anggaran	Realisasi	%
2019	9.426.063.395.934,65	8.703.232.610.159,97	92,33
2020	8.736.933.522.998,05	8.622.824.848.906,57	98,69
2021	9.183.690.915.424,00	9.383.001.507.905,44	102,17
2022	8.948.201.160.414,00	8.818.669.764.115,17	98,55
2023	10.235.036.780.199,00	10.009.979.591.478,20	97,80

Sumber: Data LRA Pemerintah Provinsi Riau, 2025

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat diamati bahwa pelaksanaan anggaran pendapatan Provinsi Riau selama periode 2019 hingga 2023 menunjukkan pola yang fluktuatif berdasarkan persentase realisasi pendapatannya. Pada tahun 2019, realisasi anggaran pendapatan tercatat sebesar 92,33%, dengan total pendapatan sebesar Rp8.703.232.610.159,97. Tahun berikutnya, yaitu 2020, terjadi peningkatan persentase pelaksanaan menjadi 98,69%, dengan jumlah pendapatan sebesar Rp8.622.824.848.906,57. Pada tahun 2021, pendapatan melebihi target anggaran, dengan tingkat realisasi mencapai 102,17% atau sebesar Rp9.383.001.507.905.440. Namun, tren ini mengalami penurunan pada 2022, di mana persentase pelaksanaan turun menjadi 98,55%, dengan nilai sebesar Rp8.818.669.764.115.170. Sementara itu, pada tahun 2023, terjadi kenaikan kembali, dengan total realisasi pendapatan mencapai Rp10.009.979.591.478,20.

Tabel 1.3

Data Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Provinsi Riau

Tahun	Belanja		
	Anggaran	Realisasi	%
2019	9.494.326.252.025,85	8.690.390.951.116,70	91,53
2020	8.818.149.638.132,52	8.172.706.474.595,31	92,68
2021	9.715.374.904.870,00	8.931.704.166.450,55	91,93
2022	9.807.168.258.136,00	9.102.467.422.821,38	92,81
2023	10.810.571.707.728,00	10.515.609.539.104,00	97,27

Sumber: Data LRA Pemerintah Provinsi Riau, 2025

Berdasarkan tabel 1.3 dapat dilihat bahwa realisasi anggaran belanja secara umum mengalami tren kenaikan namun terjadi penurunan 1 tahun di tahun 2021 sebesar 91,93% dengan total Rp 8.931.704.166.450,55. Pada tahun 2022 sebesar 92,81% dengan total Rp 9.102.467.422.821,38. Dan pada tahun 2023 sebesar 97,27% dengan total Rp 10.515.609.539.104,00.

Tabel 1.4

Hasil Analisis Varians pendapatan

Tahun	Selisih Varians Pendapatan	Kategori
2019	(722.830.785.774,68)	Kurang Baik
2020	(114.108.674.091,48)	Kurang Baik
2021	199.310.592.481,44	Baik
2022	(129.531.396.298,83)	Kurang Baik
2023	(225.057.188.720,80)	Kurang Baik

Sumber: Data Diolah, 2025

Hasil analisis terhadap variansi pendapatan Pemerintah Provinsi Riau selama tahun 2019–2023 mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan dalam pencapaian target pendapatan daerah. Selama dua tahun awal (2019 dan 2020), terjadi defisit pendapatan masing-masing sebesar Rp722,83 miliar dan Rp114,11 miliar yang mencerminkan ketidakefisienan dalam perencanaan maupun pelaksanaan anggaran, sehingga keduanya diklasifikasikan sebagai kurang memuaskan. Peningkatan kinerja hanya tercatat pada tahun 2021, dengan realisasi pendapatan yang melampaui anggaran sebesar Rp199,31 miliar.

Meskipun capaian positif sempat diraih, tren tersebut tidak bertahan. Pada tahun 2022 dan 2023, kembali terjadi ketidaksesuaian antara realisasi dan target pendapatan dengan selisih negatif sebesar Rp129,53 miliar dan Rp225,05 miliar, yang menempatkan tahun-tahun tersebut dalam kategori sedang atau “cukup”. Rerata variasi pendapatan selama lima tahun berada pada kategori kurang memuaskan karena dominasi tahun-tahun dengan defisit.

Hasil Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2023 berdasarkan Analisis Varians Pendapatan

Analisis varians pendapatan merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan yang ada pada tahun anggaran yang tersedia ditahun anggaran tersebut. Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau dalam perhitungan analisis varians pendapatan dapat dikatakan baik apabila reaslisasi pendapatan lebih besar dari pada anggaran pendapatan, dan sebaliknya apabila realisasi anggaran lebih kecil dari pada anggaran pendapatannya maka dapat dikategorikaan kurang baik.

Tabel 1. 5

Hasil Analisis Varians Pendapatan

Tahun	Selisih Varians Pendapatan	Kategori
2019	(722.830.785.774,68)	Kurang Baik
2020	(114.108.674.091,48)	Kurang Baik
2021	199.310.592.481,44	Baik
2022	(129.531.396.298,83)	Kurang Baik
2023	(225.057.188.720,80)	Kurang Baik

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan data dalam tabel, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau yang dianalisis melalui varians pendapatan menunjukkan hasil yang berfluktuasi sepanjang periode 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, terjadi selisih negatif antara realisasi pendapatan dan target anggaran sebesar Rp722.830.785.774,68, yang mencerminkan ketidaktercapaian target pendapatan dan diklasifikasikan dalam kategori “kurang memuaskan”. Kondisi serupa kembali terjadi pada tahun 2020, di mana defisit pendapatan tercatat sebesar Rp114.108.674.091,48, yang juga masuk dalam kategori yang sama.

Sementara itu, pada tahun 2021, realisasi pendapatan berhasil melampaui anggaran yang ditetapkan, menghasilkan selisih positif sebesar Rp199.310.592.481,44. Pencapaian ini mengindikasikan adanya peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pendapatan daerah. Sayangnya, tren positif tersebut tidak dapat dipertahankan. Pada tahun 2022 dan 2023, kembali terjadi defisit pendapatan masing-masing sebesar Rp129.531.396.298,83 dan Rp225.057.188.720,80, yang menjadikan kedua tahun tersebut dikategorikan sebagai “cukup” atau “biasa-biasa saja”.

Secara keseluruhan, hasil analisis varians pendapatan selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau berada dalam kategori “kurang memuaskan”. Hal ini disebabkan oleh dominasi tahun-tahun dengan realisasi pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan anggaran yang telah direncanakan, kecuali pada tahun 2021 yang menunjukkan kinerja optimal.

Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2023 berdasarkan Analisis Varians Belanja

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran yang ada pada tahun anggaran yang tersedia ditahun anggaran tersebut. Kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau dalam perhitungan analisis varians belanja dapat dikategorikan baik apabila realisasi belanja lebih kecil dari pada anggaran belanja, sebaliknya apabila realisasi belanja lebih besar dari pada anggaran belanjanya maka dapat dikategorikan kurang baik.

Tabel 1. 6

Hasil perhitungan Analisis Varians Belanja

Tahun	Selisih Varians Belanja	Kategori
2019	803.935.300.909,15	Baik
2020	645.443.163.537,21	Baik
2021	783.670.738.419,45	Baik
2022	704.700.835.314,62	Baik
2023	294.962.168.624,00	Baik

Sumber: Data Diolah, 2025

Dalam periode 2019–2023, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau yang dianalisis berdasarkan variasi pengeluaran menunjukkan konsistensi pada tingkat “baik”. Pada tahun 2019, telah dicatat selisih sebesar Rp803.935.300.909,15 antara anggaran dan realisasi belanja, yang mencerminkan bahwa pengeluaran direalisasikan di bawah batas anggaran yang ditetapkan.

Efisiensi serupa kembali ditunjukkan pada tahun 2020, di mana selisih sebesar Rp645.443.163.537,21 tercatat. Tahun berikutnya, yakni 2021, pengelolaan pengeluaran juga menghasilkan selisih sebesar Rp783.670.738.419,45, tetap berada dalam batas efisiensi. Pada

tahun 2022 dan 2023, masing-masing selisih tercatat sebesar Rp704.700.835.314,62 dan Rp294.962.168.624,00, yang keduanya juga dikategorikan sebagai kinerja keuangan yang baik dalam aspek pengeluaran.

Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2019-2023 berdasarkan Rasio Ekonomi

Untuk mengetahui rasio ekonomi maka dapat dilakukan dengan rumus:

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 1. 7

Hasil Perhitungan Analisis rasio Ekonomi

Tahun	Rasio Ekonomi (%)	Kategori
2019	91,53	Kurang Ekonomis
2020	92,68	Kurang Ekonomis
2021	91,93	Kurang Ekonomis
2022	92,81	Kurang Ekonomis
2023	97,27	Kurang Ekonomis

Sumber: Data Diolah, 2025

Berdasarkan informasi pada tabel, performa keuangan Pemerintah Provinsi Riau yang diukur melalui rasio ekonomi selama periode 2019 hingga 2023 memperlihatkan kecenderungan yang stabil, namun masih tergolong dalam kategori yang kurang menggembirakan. Persentase rasio tersebut tercatat sebesar 91,53% pada tahun 2019, 92,68% pada 2020, 91,93% pada 2021, 92,81% pada 2022, dan meningkat menjadi 97,27% pada tahun 2023.

Jika merujuk pada standar ideal efisiensi ekonomi, capaian tersebut belum mampu menembus batas kategori optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa sumber daya fiskal yang tersedia belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menghasilkan keluaran yang diharapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun penganggaran telah dilakukan dalam jumlah yang signifikan, proses realisasi belanja belum terlaksana sesuai perencanaan yang telah dirumuskan. Kemungkinan besar, kendala-kendala internal seperti lemahnya perencanaan dan

koordinasi, serta faktor eksternal seperti dinamika kebijakan nasional dan perubahan kondisi ekonomi makro, turut menjadi penyebabnya.

Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2019-2023 berdasarkan Rasio Efisiensi

Pada rasio efisiensi menggunakan data realisasi pendapatan dan realisasi belanja. Berikut merupakan tabel realisasi pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Provinsi Riau tahun 2019-2023:

Tabel 1. 5

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Riau

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja
2019	8.703.232.610.159,97	8.690.390.951.116,70
2020	8.622.824.848.906,57	8.172.706.474.595,31
2021	9.383.001.507.905,44	8.931.704.166.450,55
2022	8.818.669.764.115,17	9.102.467.422.821,38
2023	10.009.979.591.478,20	10.515.609.539.104,00

Sumber: Data LRA Pemerintah Provinsi Riau, 2025

Tabel diatas menunjukkan realisasi pendapatan dan realisasi belanja daerah Pemerintah Provinsi Riau. Data ini digunakan untuk menghitung menghitung rasio efisiensi yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 1. 8

Hasil Perhitungan Analisis Rasio Efisiensi

Tahun	Rasio Efisiensi (%)	Nilai
2019	99,85	Kurang Efisien
2020	94,77	Kurang Efisien
2021	95,19	Kurang Efisien
2022	103,21	Tidak Efisien
2023	105,05	Tidak Efisien

Sumber: Data Diolah, 2025

Fluktuasi dalam indeks efisiensi telah ditunjukkan oleh Pemerintah Provinsi Riau sepanjang tahun 2019 hingga 2023, sebagaimana tercermin dalam data tabel. Efisiensi anggaran pada tahun 2019 dicatat sebesar 99,85%, diikuti oleh 94,77% pada tahun 2020, dan 95,19% pada tahun 2021. Ketiganya meskipun mendekati ambang batas efisiensi optimal, tetap diklasifikasikan sebagai kurang efisien.

Sebaliknya, pada tahun 2022 dan 2023, tingkat efisiensi melampaui ambang batas tersebut dengan capaian 103,21% dan 105,05%. Kondisi ini mencerminkan bahwa belanja daerah telah dilaksanakan melebihi pendapatan yang tersedia, sehingga menimbulkan kesimpulan bahwa efisiensi fiskal pada dua tahun terakhir tergolong rendah.

Hasil Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Riau tahun 2019-2023 berdasarkan Analisis Rasio Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya mengacu pada pencapaian tujuan atau sasaran suatu kebijakan (yaitu, hasil yang bermanfaat). Efektivitas mengukur hubungan antara hasil yang dicapai dan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Suatu kegiatan operasional dianggap efektif jika prosesnya mencapai tujuan dan sasaran akhir. Untuk menentukan tingkat efektivitas, dapat digunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 1. 9
Perhitungan Analisis rasio Efektivitas

Tahun	Persentase (%)	Nilai
2019	92,33	Efektif
2020	98,69	Efektif
2021	102,17	Sangat Efektif
2022	98,55	Efektif
2023	97,80	Efektif

Sumber: Data Diolah, 2025

Selama periode 2019 hingga 2023, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Riau, jika diukur berdasarkan indeks efisiensi, memperlihatkan tren yang cenderung stabil dalam kategori baik. Nilai efisiensi yang tercatat mencapai 92,33% pada tahun 2019, meningkat menjadi

98,69% di tahun 2020, melonjak ke 102,17% pada 2021, lalu sedikit menurun menjadi 98,55% pada 2022, dan 97,80% pada tahun 2023. Berdasarkan klasifikasi standar efisiensi, hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilakukan secara efektif pada tahun-tahun selain 2021, yang justru menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat tinggi karena melewati ambang batas efisiensi ideal.

E. KESIMPULAN

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa performa keuangan Pemerintah Provinsi Riau belum mencapai standar yang diharapkan, khususnya dalam aspek pendapatan. Selama periode 2019–2023, pendapatan yang dihasilkan pada umumnya lebih kecil daripada target anggaran yang ditetapkan, kecuali pada tahun 2021 yang menunjukkan capaian melampaui ekspektasi anggaran.

Efisiensi dalam pengeluaran, sebaliknya, dapat dikategorikan baik. Seluruh tahun dalam periode analisis mencatatkan realisasi belanja yang lebih rendah dibandingkan rencana, menandakan alokasi dana yang dijalankan secara bijak.

Namun, berdasarkan rasio ekonomi, pengelolaan anggaran belum mencerminkan efisiensi optimal. Nilai rasio yang berkisar antara 91% hingga 97% menunjukkan bahwa belanja belum dilakukan pada tingkat harga paling ekonomis.

Dari aspek rasio efisiensi, ketidakefisienan masih ditemukan pada tiga tahun pertama (2019–2021), sementara dua tahun berikutnya (2022–2023) menunjukkan rasio melebihi 100%, yang justru mencerminkan pemborosan anggaran. Sementara itu, efektivitas pengelolaan anggaran dianggap memadai pada sebagian besar tahun, dan tahun 2021 bahkan menunjukkan tingkat efektivitas yang sangat tinggi

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad. (2019). *Manajemen keuangan daerah dalam era otonomi daerah: Sebuah kajian teoritis dan empiris*. <https://www.researchgate.net/publication/331175046>
- Basni, U. (2017). Analisis laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk menilai kinerja pemerintah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 6(12), 1–16.
- Budiyanti, E. (2023). Rendahnya realisasi anggaran pemerintah menjelang akhir tahun 2023. *Analisis Legislatif Ahli Madya*, 2023–2024.
- Gurhanawan. (2023). Analisis laporan realisasi anggaran sebagai penilaian terhadap kinerja keuangan pada Kantor Inspektorat Pembantu Wilayah Kerja Jakarta Barat. *Co-Creation:*

Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Bisnis, 2(3), 125–131.

<https://doi.org/10.55904/cocreation.v2i3.527>

Hendriko, D. P. (2021). Analisa dan klasifikasi kemampuan keuangan kabupaten/kota di Provinsi Riau dalam era otonomi daerah. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi (SNEBA)*, 1, 211–218.
<https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/sneba/article/view/2760>

Lafera, D., & Maniza, S. L. (2024). Analisis laporan realisasi anggaran untuk menilai kinerja keuangan pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang. *Jurnal Riset Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, 1(2), 97–106. <https://doi.org/10.62194/vk2tk392>

Mayssara. (2022). *Laporan realisasi anggaran. Laporan Realisasi Anggaran*, 3(2), 1–40.